

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN DESA DI DESA AIR KOTOK KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Supawanhar¹, Sri Suharti², Ovita Charolina³
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Adimintrasi Bengkulu
Supawanhar83@gmail.com

Received: 28-06- 2026

Revised: 10-07-2026

Approved: 28-07-2026

ABSTRAK

Pemerintah Desa Air Kotok, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai kendala dalam penataan administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa, terutama terkait rendahnya pemahaman aparatur mengenai pengelolaan dokumen administrasi, pengarsipan, serta administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, praktik, serta pendampingan. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni 2026 dengan melibatkan **25 orang** aparatur dan pemangku kepentingan Desa Air Kotok. Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen **pre-test** dan **post-test** berupa kuesioner yang terdiri atas delapan indikator kompetensi administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan rata-rata skor dan persentase peningkatan hasil belajar peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari **57,5%** sebelum pelatihan menjadi **88,3%** setelah pelatihan atau mengalami peningkatan sebesar **30,8%**. Selain meningkatkan kompetensi aparatur desa, kegiatan ini juga mendorong terciptanya penataan administrasi yang lebih sistematis, pengelolaan administrasi keuangan yang lebih tertib, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa model pelatihan dan pendampingan dapat menjadi alternatif strategi peningkatan kapasitas aparatur desa yang dapat direplikasi pada desa lain dengan karakteristik yang serupa.

Kata Kunci: Administrasi Desa; Aparatur Desa; Capacity Building; Tata Kelola Desa; Administrasi Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas administrasi secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Administrasi desa memiliki peran penting sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penataan administrasi yang baik akan menghasilkan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan

keputusan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, serta pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan masih menghadapi berbagai kendala.

Penelitian yang dilakukan oleh Untari dkk. (2022) menemukan bahwa kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan belum optimal, terutama pada aspek penguasaan konseptual administrasi, keterampilan teknis, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Keterbatasan pendidikan, minimnya pelatihan, serta kurangnya penguasaan aplikasi administrasi menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas administrasi desa.

Sejalan dengan itu, Akmal dkk. (2024) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek teknis dan manajerial. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan profesional.

Berbagai penelitian terdahulu (Hasanah, B., & Sururi, A. (2018); Rembu, Y., Naiheli, A., Uskono, N., & Kefi, H. (2026) menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas aparatur desa masih menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam aspek administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi aparatur desa, sedangkan implementasi program peningkatan kapasitas melalui pendekatan pelatihan yang dipadukan dengan praktik langsung, pendampingan teknis, dan evaluasi berbasis pengukuran kompetensi masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara hasil penelitian dengan implementasi solusi yang mampu meningkatkan kompetensi aparatur desa secara berkelanjutan.

Desa Air Kotok dipilih sebagai lokasi kegiatan berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pemerintah desa yang menunjukkan bahwa sebagian besar administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan belum tertata secara optimal, pengarsipan dokumen masih dilakukan secara manual, serta belum pernah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan mengenai penataan administrasi desa. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat serta belum maksimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

Secara konseptual, peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan organisasi agar aparatur mampu melaksanakan tugas pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif administrasi publik, penguatan kapasitas aparatur menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan prinsip *good governance*, karena kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang mengelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini mengintegrasikan sosialisasi, pelatihan, praktik, dan

pendampingan sebagai strategi peningkatan kapasitas aparatur desa yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kemampuan implementasi administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa.

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan berdasarkan peningkatan kompetensi aparatur desa yang diukur melalui hasil pre-test dan post-test, kemampuan peserta dalam menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai regulasi, kemampuan melakukan penataan arsip administrasi dan administrasi keuangan, serta meningkatnya komitmen aparatur dalam menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel Hartati, D. A., Ambo, et al (2024)..

Penelitian Sulistio dkk. (2023) juga menegaskan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan faktor penting dalam penyusunan kebijakan desa dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Aparatur desa dituntut memiliki kemampuan administrasi, pemahaman regulasi, serta keterampilan dalam mengelola dokumen dan data pemerintahan secara sistematis.

Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Air Kotok, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi mitra, yaitu:

1. Belum optimalnya penataan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Masih terbatasnya pemahaman aparatur desa mengenai jenis-jenis administrasi desa yang wajib diselenggarakan.
3. Kurangnya keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan arsip dan dokumen administrasi desa.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi desa.
5. Kurangnya kegiatan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi aparatur desa.

Permasalahan tersebut apabila tidak segera diatasi dapat berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik, kurang optimalnya akuntabilitas pemerintahan desa, serta hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Solusi yang Ditawarkan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian STIA Bengkulu menawarkan solusi melalui kegiatan **Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penataan Administrasi Desa** yang meliputi:

1. Pemberian materi mengenai konsep dan regulasi administrasi pemerintahan desa.
2. Pelatihan penyusunan dan pengelolaan buku-buku administrasi desa.
3. Pelatihan pengarsipan dan dokumentasi administrasi desa.
4. Pendampingan dalam penataan administrasi pemerintahan desa.
5. Diskusi dan konsultasi mengenai permasalahan administrasi yang dihadapi aparatur desa.

Melalui kegiatan ini diharapkan aparatur dan pemangku kepentingan Desa Air Kotok memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang lebih baik dalam menyelenggarakan administrasi desa secara tertib, efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil observasi awal, wawancara dengan pemerintah Desa Air Kotok, serta identifikasi kebutuhan mitra, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penataan administrasi pemerintahan desa. Permasalahan tersebut meliputi aspek pemahaman regulasi, pengelolaan dokumen administrasi, pengarsipan, pemanfaatan teknologi informasi, dan keterbatasan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian menawarkan solusi berupa kegiatan sosialisasi, pelatihan, praktik, dan pendampingan yang disajikan pada Tabel 1.

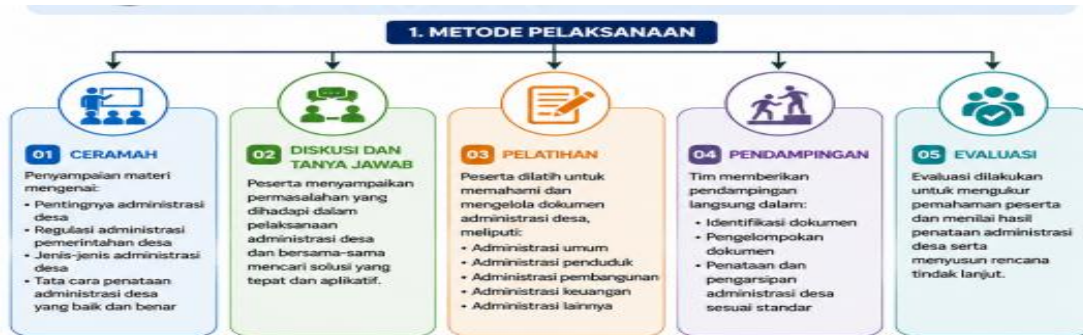
Tabel 1. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

No	Permasalahan Mitra	Akar Permasalahan	Solusi yang Ditawarkan
1	Penataan administrasi desa belum berjalan secara optimal.	Kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai standar administrasi pemerintahan desa.	Sosialisasi dan penyampaian materi mengenai regulasi serta standar administrasi desa.
2	Sebagian perangkat desa belum memahami jenis-jenis administrasi desa yang wajib diselenggarakan.	Minimnya pelatihan dan pembinaan terkait administrasi desa.	Pelatihan tentang administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya.
3	Pengelolaan arsip dan dokumen administrasi desa belum tertata secara sistematis.	Belum adanya keterampilan teknis dalam pengarsipan dan manajemen dokumen desa.	Pelatihan dan praktik penataan arsip serta pengelompokan dokumen administrasi desa.
4	Ketersediaan data dan dokumen administrasi belum lengkap dan belum diperbarui secara berkala.	Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemutakhiran data administrasi desa.	Pendampingan dalam inventarisasi, pemutakhiran, dan penataan dokumen administrasi desa.
5	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi desa masih terbatas.	Rendahnya kemampuan aparatur dalam penggunaan teknologi pendukung administrasi.	Pengenalan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi desa.
6	Belum tersedia kegiatan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa.	Keterbatasan akses terhadap sumber pembelajaran dan pendampingan teknis.	Pendampingan langsung serta konsultasi mengenai permasalahan administrasi yang dihadapi aparatur desa.

Selain administrasi umum, administrasi keuangan desa merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan administrasi keuangan meliputi penatausahaan APBDes, buku kas umum, buku bank, buku pajak, bukti transaksi, serta pengarsipan dokumen keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi awal, aparatur Desa Air Kotok masih memerlukan penguatan kapasitas dalam penataan administrasi keuangan agar seluruh dokumen keuangan terdokumentasi secara tertib dan mendukung akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, materi administrasi keuangan turut menjadi bagian dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026 di Desa Air Kotok, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah. Peserta kegiatan terdiri atas seluruh perangkat desa dan pemangku kepentingan desa yang berjumlah 25 orang Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 2. Tahapan Kegiatan

1. Metode Ceramah

Tim pengabdian menyampaikan materi mengenai pentingnya administrasi desa, regulasi administrasi pemerintahan desa, serta tata cara penataan administrasi desa yang baik dan benar.

2. Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi desa sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan kondisi lapangan.

3. Metode Pelatihan

Peserta dilatih untuk memahami dan mengelola berbagai dokumen administrasi desa, termasuk administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi pembangunan, administrasi keuangan, dan administrasi lainnya yang menjadi kewajiban pemerintah desa.

4. Metode Pendampingan

Tim pengabdian memberikan pendampingan langsung kepada peserta dalam melakukan identifikasi, pengelompokan, dan penataan dokumen administrasi desa agar sesuai dengan standar administrasi pemerintahan desa.

Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Air Kotok.
2. Identifikasi kebutuhan dan permasalahan administrasi desa.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan.
4. Pendampingan praktik penataan administrasi desa.
5. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan.

Evaluasi Kegiatan dan Teknik Analisis Data

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa. Instrumen evaluasi yang digunakan berupa kuesioner **pre-test** dan **post-test** yang terdiri atas delapan indikator penilaian meliputi pemahaman konsep administrasi pemerintahan desa, administrasi keuangan desa, pengelolaan arsip, penyusunan administrasi pemerintahan, pengelolaan APBDes, pengarsipan dokumen keuangan, transparansi administrasi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa. Sebelum digunakan, instrumen terlebih dahulu direview oleh dua dosen bidang Administrasi Publik sebagai bentuk validasi isi (*expert judgment*) agar seluruh indikator sesuai dengan tujuan kegiatan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan nilai rata-rata pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan. Persentase peningkatan dihitung berdasarkan selisih rata-rata nilai sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu, dilakukan observasi langsung selama proses pendampingan untuk mengetahui perubahan kemampuan peserta dalam menyusun administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa.

Keberhasilan kegiatan ditetapkan berdasarkan beberapa indikator, yaitu meningkatnya rata-rata nilai post-test dibandingkan pre-test, meningkatnya kemampuan peserta dalam menata administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa sesuai regulasi, meningkatnya keterampilan pengarsipan dokumen administrasi, serta meningkatnya komitmen aparatur desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penataan Administrasi Desa* di Desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi. Seluruh perangkat desa dan pemangku kepentingan desa berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung dengan baik dan mendapat respon positif dari seluruh peserta. Aparatur desa dan pemangku kepentingan menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung.

Pada sesi penyampaian materi, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya administrasi desa sebagai instrumen pendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Peserta juga memahami berbagai jenis administrasi desa yang harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami kendala dalam pengelolaan dokumen administrasi, pengarsipan, serta penyusunan laporan administrasi desa. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Untari dkk. (2022) yang menyatakan bahwa keterampilan teknis aparatur desa dalam penyelenggaraan administrasi masih memerlukan peningkatan melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan pelatihan dan praktik langsung, peserta memperoleh pengalaman dalam melakukan penataan administrasi desa secara sistematis. Aparatur desa mulai memahami pentingnya kelengkapan dokumen administrasi sebagai dasar pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain itu, peserta juga menyadari pentingnya peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Akmal dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pengembangan kompetensi aparatur desa perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman peserta mengenai hubungan antara kompetensi aparatur dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Kompetensi yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, ketepatan pengelolaan administrasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Azis dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa.

1. Hasil Pelaksanaan Metode Ceramah

Pada tahap ceramah, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai pentingnya administrasi desa, regulasi yang mengatur administrasi pemerintahan desa, jenis-jenis administrasi desa, serta tata cara penataan administrasi yang baik dan benar. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif sehingga peserta dapat memahami keterkaitan antara administrasi desa dengan kualitas pelayanan publik.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi administrasi desa sebagai instrumen pendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta belum memahami secara menyeluruh mengenai jenis administrasi yang wajib tersedia di desa. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mampu mengidentifikasi berbagai administrasi yang harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Akmal et al. (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan mampu meningkatkan pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi pemerintahan desa. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar 1 dan 2



Gambar 3. Penyiampaian materi oleh Narasumber

Hasil Pelaksanaan Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi desa. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain belum tertatanya arsip desa secara sistematis, kurang lengkapnya dokumen administrasi, serta terbatasnya pemahaman perangkat desa terhadap prosedur administrasi yang berlaku.

Melalui diskusi, peserta dan tim pengabdian bersama-sama mengidentifikasi akar permasalahan serta merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi Desa Air Kotok. Kegiatan ini mendorong partisipasi aktif peserta dan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kontekstual.

Diskusi juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran bersama bahwa administrasi desa bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.



Gambar 4. Diskusi dan Tanya Jawab



Hasil Pelaksanaan Metode Pelatihan

Pada tahap pelatihan, peserta diberikan pemahaman teknis mengenai pengelolaan administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi pembangunan, administrasi keuangan, dan administrasi lainnya yang menjadi kewajiban pemerintah desa.

Peserta melakukan simulasi dan praktik pengisian dokumen administrasi desa sesuai format yang berlaku. Melalui kegiatan ini, aparatur desa memperoleh keterampilan baru dalam menyusun, mengelompokkan, dan mengelola dokumen administrasi secara sistematis.

Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam memahami struktur administrasi desa dan tata cara penyimpanan dokumen yang benar. Temuan ini mendukung hasil penelitian Untari et al. (2022) yang menyebutkan bahwa pelatihan teknis mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Hasil Pelaksanaan Metode Pendampingan

Pendampingan dilakukan secara langsung dengan memberikan bimbingan kepada peserta dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menata dokumen administrasi desa yang tersedia. Melalui pendampingan ini, peserta dapat menerapkan secara langsung materi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Pendampingan membantu peserta memahami langkah-langkah praktis dalam melakukan penataan administrasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa perangkat desa mulai mampu melakukan pengelompokan dokumen berdasarkan jenis administrasi, menyusun arsip secara lebih tertib, serta memahami mekanisme pemutakhiran data administrasi secara berkala.

Menurut Sulistio et al. (2023), kompetensi aparatur desa dalam aspek administratif dan manajerial merupakan faktor penting yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan

menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

Pendampingan juga dilakukan terhadap penataan administrasi keuangan desa melalui identifikasi kelengkapan dokumen keuangan, pengarsipan bukti transaksi, dan penyusunan dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban. Aparatur desa didampingi dalam mengelompokkan dokumen keuangan berdasarkan jenis administrasinya sehingga lebih mudah dalam proses monitoring, evaluasi, audit, maupun pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Hasil Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung dan melalui diskusi akhir dengan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memberikan respon positif terhadap seluruh rangkaian kegiatan.

Sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Selain itu, peserta juga mengharapkan adanya kegiatan pendampingan lanjutan agar implementasi penataan administrasi desa dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Evaluasi Dampak Kegiatan.

**Tabel 2. Instrumen Evaluasi Pre-Test dan Post-Test
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**

No	Indikator Penilaian	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Peningkatan (%)
1	Pemahaman tentang konsep dan fungsi administrasi pemerintahan desa	60,0	90,0	30,0
2	Pemahaman mengenai jenis-jenis administrasi desa	58,0	89,0	31,0
3	Kemampuan menata dan mengarsipkan dokumen administrasi desa	55,0	87,0	32,0
4	Kemampuan menyusun administrasi pemerintahan desa secara tertib	56,0	88,0	32,0
5	Pemahaman mengenai administrasi keuangan desa sesuai regulasi	57,0	87,0	30,0
6	Pemahaman tentang pengelolaan APBDes, Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pajak	56,0	89,0	33,0
7	Kemampuan mengelola dan mengarsipkan dokumen administrasi keuangan desa	58,0	88,0	30,0
8	Pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas administrasi pemerintahan dan keuangan desa	60,0	89,0	29,0

No	Indikator Penilaian	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Peningkatan (%)
Rata-rata	Tingkat Pemahaman Aparatur Desa	57,5	88,3	30,8

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 57,5% pada saat pre-test menjadi 88,3% pada saat post-test atau mengalami peningkatan sebesar 30,8%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode pelatihan yang memadukan ceramah, diskusi, praktik langsung, dan pendampingan mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa.

Peningkatan kompetensi peserta dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, materi pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan riil yang dihadapi aparatur Desa Air Kotok sehingga seluruh materi bersifat aplikatif. Kedua, kegiatan praktik memberikan kesempatan kepada peserta untuk menerapkan secara langsung penyusunan administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, dan pengarsipan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, kegiatan pendampingan memungkinkan peserta memperoleh bimbingan secara langsung sehingga kesalahan yang muncul selama praktik dapat segera diperbaiki.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian Untari et al. (2022) yang menyatakan bahwa pelatihan teknis mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Akmal et al. (2024) yang menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa harus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan agar mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, hasil kegiatan mendukung temuan Sulistio et al. (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kualitas pelayanan publik.

Meskipun kegiatan menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa keterbatasan. Pendampingan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga implementasi penataan administrasi desa dalam jangka panjang belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, kegiatan hanya dilaksanakan pada satu desa sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh desa dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendampingan lanjutan serta monitoring secara periodik agar perubahan yang telah dicapai dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Tabel 2. Evaluasi Dampak Kegiatan PKM

Aspek Dampak	Indikator Keberhasilan	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Setelah Kegiatan
--------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

Aspek Dampak	Indikator Keberhasilan	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Setelah Kegiatan
Pengetahuan	Pemahaman tentang administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa	Pemahaman aparatur mengenai administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan masih terbatas	Pemahaman meningkat, aparatur mampu menjelaskan jenis administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa sesuai regulasi
Keterampilan Administrasi	Kemampuan menyusun administrasi pemerintahan desa	Penyusunan administrasi belum sistematis dan belum sesuai ketentuan	Aparatur mampu menyusun administrasi pemerintahan desa secara lebih sistematis dan sesuai ketentuan
Administrasi Keuangan	Kemampuan mengelola administrasi keuangan desa (APBDes, Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, dan bukti transaksi)	Penataan dokumen keuangan belum lengkap dan pengarsipan belum tertib	Aparatur mampu menata dokumen administrasi keuangan secara lebih rapi, lengkap, dan sesuai ketentuan sehingga mendukung penyusunan laporan pertanggungjawaban
Pengarsipan	Kemampuan mengelola arsip administrasi dan keuangan desa	Arsip administrasi dan dokumen keuangan belum tertata dengan baik sehingga sulit ditelusuri	Arsip administrasi dan dokumen keuangan tersusun lebih sistematis, mudah ditemukan, dan terdokumentasi dengan baik
Tata Kelola Pemerintahan	Ketertiban administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa	Tata kelola administrasi belum optimal dan belum terdokumentasi secara menyeluruh	Tata kelola administrasi menjadi lebih tertib, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik
Pelayanan Publik	Efektivitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	Proses pelayanan administrasi relatif lambat karena penataan dokumen belum optimal	Pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan didukung oleh ketersediaan dokumen yang tertata
Komitmen Aparatur	Kesadaran menerapkan tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan desa	Kesadaran aparatur terhadap pentingnya tertib administrasi dan administrasi keuangan masih rendah	Aparatur memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk menerapkan administrasi yang tertib, transparan, akuntabel
Pengetahuan	Pemahaman tentang administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa	Pemahaman aparatur mengenai administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan masih terbatas	Pemahaman meningkat, aparatur mampu menjelaskan jenis administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa sesuai regulasi
Keterampilan Administrasi	Kemampuan menyusun	Penyusunan administrasi belum	Aparatur mampu menyusun administrasi pemerintahan desa

Aspek Dampak	Indikator Keberhasilan	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Setelah Kegiatan
	administrasi pemerintahan desa	sistematis dan belum sesuai ketentuan	secara lebih sistematis dan sesuai ketentuan

PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Air Kotok berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata hasil pre-test dan post-test sebesar 30,8%, yang mencerminkan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam penyusunan administrasi, pengelolaan arsip, serta administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi individu aparatur, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Model pelatihan dan pendampingan yang diterapkan dalam kegiatan ini berpotensi direplikasi pada desa-desa lain yang memiliki karakteristik permasalahan serupa. Sebagai tindak lanjut, diperlukan program pendampingan secara berkala, monitoring implementasi administrasi desa, serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi agar keberlanjutan hasil kegiatan dapat terus terjaga dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, F. N., Dwiputrianti, S., Jubaedah, E., Listiani, T., & Afandi, M. N. (2024). *Pengembangan kompetensi aparatur desa melalui analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pemerintahan desa*. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi.
- Azis, D. I., Roni, Nasiruddin, & Kharisma, A. S. (2024). Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Brebes. *Journal of Finance and Accounting Studies*, 7(2).
- Hartati, D. A., Ambo, A. M. C., Ihsan, F., Zelila, Z., Alimudin, M., & Nursin, E. (2024). PENGUATAN KAPASITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 85-97.
- Hasanah, B., & Sururi, A. (2018). Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan masyarakat melalui pelatihan administrasi pemerintahan di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. *Wikrama Parahita: jurnal pengabdian masyarakat*, 2(2), 68.
- Romi, M. N. A. S., Nanarhati, E. D., Ikhwaningrum, D. U., & Rahmawati, D. A. N. D. (2025). *Systematic review kapasitas sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan dana desa*. *Reformasi*, 14(2), 357–368.

- Rembu, Y., Naiheli, A., Uskono, N., & Kefi, H. (2026). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Penataan Administrasi di Desa Rinbesihat Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu. *Transformasi Masyarakat: Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian*, 3(1), 51-60.
- Sulistio, E. B., Hutagalung, S. S., & Fadoli, M. I. (2023). Analisis kompetensi aparatur pemerintah desa dalam perumusan kebijakan desa. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(1), 83–97.
- Untari, S., Habib, M. M., Shofa, A. M. A., Fauziah, L. N., & Riswari, A. A. (2022). Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*, 5(2).